

Pangandaran!
Juwara!



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA 2023

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERADGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**



disdagkop_kab.pangandaran



disdagkop pangandaran



disdagkop_kab.pangandaran



disdagkop pangandaran



dpkumkm.pangandaran@gmail.com



disdagkop.pangandarankab.go.id





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Ardiyasa No.17 (komplek pasar parigi) Desa Karangjaladri
Kecamatan Parigi 46393, Telepon, (0265) 2641122, Faks, (0265) 2641122
Surel : diskopdagin.pangandaran@gmail.com; Website : disdagkop.pangandarankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts-468/Diskopdagin/2022

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023

KEPALA KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 360 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2023;
- : b. bahwa Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Diskopdagin adalah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran yang merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan koperasi dan UKM, perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Pangandaran.
2. Kepala Diskopdagin adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Diskopdagin.
3. Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Disdagkop UMKM adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
4. Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja Diskopdagin adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II SISTEMATIKA RENJA Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program Dan Kegiatan
- IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
- V. Penutup
- Lampiran

BAB III
ISI DAN URAIAN RENJA
Pasal 3

Isi beserta uraian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

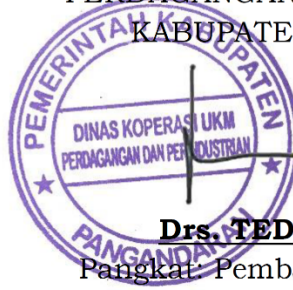
Renja Diskopdagin Tahun 2023 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Diskopdagin Tahun 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Diskopdagin ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Diskopdagin.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 27 Juli 2022

KEPALA KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN,



Drs. TEDI GARNIDA, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19680728 199303 1 008

Tembusan yth.:

1. Bupati Pangandaran
2. Wakil Bupati Pangandaran
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
4. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran

KATA PENGANTAR



Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran 2021-2026 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian selama periode 2021-2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan dan koperasi UMKM. Rencana Kerja (Renja) ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2023). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada akhir tahun anggaran 2023.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor perdagangan dan koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 27 Juli 2022

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. TEDI GARNIDA, MM
NIP. 19680728 199303 1 008

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan.....	6
1.4 Sitematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	35
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	49
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan	49
3.1.1 Kebijakan Nasional.....	49
3.1.1.1 Kementerian Koperasi UKM	49
3.1.1.2 Kementerian Perdagangan	53
3.1.1.3 Kementerian Perindustrian	55
3.1.2 Kebikajan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	55
3.1.2.1 Dinas Koperasi Usaha Kecil.....	55
3.1.2.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	56
3.1.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	64
3.2.1 Rencana Strategis	64



3.2.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	66
3.2.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .	66
3.2.1.3 Strategi	67
3.2.1.4 Arah Kebijakan	67
3.3 Program dan Kegiatan	69
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 85
 BAB V PENUTUP	 102

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Pangandaran	9
Tabel 2.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	24
Tabel 2.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja	25
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kesatu	26
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kedua	27
Tabel 2.6 Hasil Pengukuran Kesehatan Koperasi	28
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Ketiga	30
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Keempat	30
Tabel 2.9 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran	34
Tabel 2.10 T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2022 Kabupaten Pangandaran	38
Tabel 2.11 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Pangandaran	47
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	49
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Kementerian Perdagangan	53
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat	56
Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat	57
Tabel 3.5 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran	59
Tabel 3.6 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	60
Tabel 3.7 Korelasi Sasaran Renstra dengan Janji Politik Bupati Terpilih	63
Tabel 3.8 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	85



Tabel 3.9 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	68
Tabel 3.10 T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Pangandaran	71

DAFTAR GAMBAR



Gambar 2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	24
Gambar 3.1 Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024	51
Gambar 3.2 Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024	52
Gambar 3.3 Cascading Misi 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026	64
Gambar 3.4 Cascading Misi 5 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026	65

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan bagian integral dari sistem perencanaan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pendukung pencapaian tujuan pemerintah. Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang disusun melalui metode secara teknokratik, partisipatif, politik, *top down dan bottom up* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid, komprehensif dan terintegrasi dari berbagai lini dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan berkelanjutan yakni:

- 1) penyusunan rencana;
- 2) penetapan rencana;
- 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)**, yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan akuntabel, diperlukan komitmen bersama untuk meraih Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan serapan aspirasi masyarakat bawah melalui mekanisme Musrenbang/des/Kel, Musrenbang Kecamatan. Hasil/Usulan Musrenbang tersebut ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah untuk dipadukan dan diformulasikan dengan usulan Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Forum Musrenbang Kabupaten (Musrenbang RKPD).

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Kepala Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang



- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran



- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009



- tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);

44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 55).
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 83).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran adalah:

- Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur;
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.
- Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 merupakan langkah adaptasi program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran antara lain adalah

- Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik secara terukur;
- Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dengan arahan strategis visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran;
- Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang

terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Laporan hasil kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 diambil dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) yang merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Hasil kinerja program / kegiatan Rencana Kerja Tahun 2020 telah memenuhi target. Walaupun ada beberapa program / kegiatan yang kurang dari target, namun secara keseluruhan kinerja yang dicapai adalah baik. Berikut ini disajikan Tabel evaluasi pelaksanaan Renja 2020:



Tabel 2.1 T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Program s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100	%	0	0	0	0	100	100	100
			2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100	%	0	0	0	0	100	100	100
			3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100	%	0	0	0	0	100	100	100
			4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100	%	0	0	0	0	100	100	100
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100	%	0	0	0	0	100	100	100
			2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100	%	0	0	0	0	100	100	100
			3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100	%	0	0	0	0	100	100	100
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2	Dokumen	0	0	0	0	2	2	100
	Revisi Renstra SKPD					0	0	0	0		0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan		Kegiatan dan Dokumen	0	0	0	0		0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan		Kegiatan dan Dokumen	0	0	0	0		0	0
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan		Kegiatan dan Dokumen	0	0	0	0		0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan		Kegiatan dan Dokumen	0	0	0	0		0	0
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan		Kegiatan dan Dokumen	0	0	0	0		0	0
	Penyusunan LAKIP	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	3	Laporan	0	0	0	0	3	3	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100	%	0	0	0	0	100	100	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	19	Orang	0	0	0	0	19	19	100
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan		Dokumen	0	0	0	0		0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	0	0	0	12	12	100
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi SKPD yang dilaksanakan		Kegiatan dan Laporan	0	0	0		0	0
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	12 dan 1	Kegiatan dan Laporan	0	0	0	12 dan 1	12 dan 1	100
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan		Dokumen	0	0	0		0	0
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	2	Laporan	0	0	0	2	2	100
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun		Dokumen	0	0	0		0	0
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100	%	0	0	0	100	100	100
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	2	Dokumen	0	0	0	2	2	100
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan		Jenis dan Unit/Buah	0	0	0		0	0
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan	1 dan 1	Kegiatan dan Laporan	0	0	0	1 dan 1	1 dan 1	100
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	2 dan 2	Kegiatan dan Laporan	0	0	0	2 dan 2	2 dan 2	100
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	12	Laporan	0	0	0	12	12	100
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	7 dan 399	Jenis dan Unit/Buah	0	0	0	7 dan 399	7 dan 399	100
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang digunakan		Jenis dan Unit/Buah	0	0	0		0	0
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	100	%	0	0	0	100	100	100
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun		Dokumen	0	0	0		0	0
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan yang dianalisa, dikembangkan dan disusun		Kebijakan	0	0	0		0	0
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah penyuluhan kebijakan retribusi daerah yang dilaksanakan		Kegiatan dan Laporan	0	0	0		0	0
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah yang didata	2358	Objek	0	0	0	2358	2358	100
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah data retribusi daerah yang dikelola		Data	0	0	0		0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah wajib retribusi yang ditetapkan	2	Objek	0	0	0	2	2	100
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pengelolaan retribusi yang di laporkan	12	Laporan	0	0	0	12	12	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100	%	0	0	0	100	100	100
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang ditingkatkan		Jenis dan Unit/Buah	0	0	0		0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	44	Set	0	0	0	44	44	100
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu					0	0	0		0	0
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian yang dikelola		Dokumen	0	0	0		0	0
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	12 dan 12	Kegiatan dan Laporan	0	0	0	12 dan 12	12 dan 12	100
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kegiatan dan Laporan	0	0	0		0	0
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun yang dipulangkan	2	Orang	0	0	0	2	2	100
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang dipulangkan		Orang	0	0	0		0	0
		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan		Orang	0	0	0		0	0
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi		Orang	0	0	0		0	0
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		Kegiatan dan Laporan	0	0	0		0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan		Kegiatan dan Laporan	0	0	0		0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Formal					0	0	0		0	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	0	0	0	100	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	Jenis	0	0	0	7	7	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	110	Jenis	0	0	0	110	110	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20	Jenis	0	0	0	20	20	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Jenis dan Unit/Buah	0	0	0		0	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	Jenis	0	0	0	6	6	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10	Jenis	0	0	0	10	10	100
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	20	Jenis	0	0	0	20	20	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	1000	Orang	0	0	0	1000	1000	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	140 dan 140	Kegiatan dan Laporan	0	0	0	140 dan 140	140 dan 140	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah					0	0	0		0	0
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola		Dokumen	0	0	0		0	0
	Penyediaan Jasa Publikasi	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	1	Sistem	0	0	0	1	1	100
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Website SKPD					0	0	0		0	0
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100	%	0	0	0	100	100	100
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	Unit	0	0	0	2	2	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	2	Unit	0	0	0	2	2	100
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar diadakan		Unit	0	0	0		0	0
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan		Unit	0	0	0		0	0
	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 dan 7	Jenis dan Unit/Buah	0	0	0	3 dan 7	3 dan 7	100
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 dan 15	Jenis dan Unit/Buah	0	0	0	5 dan 15	5 dan 15	100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					0	0	0		0	0
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan		Jenis dan Unit/Buah	0	0	0		0	0
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan		Jenis dan Unit/Buah	0	0	0		0	0
	Penyewaan Tanah/Gedung Kantor	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	Unit dan M2	0	0	0	2	2	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi		Jenis dan Unit/Buah atau M2	0	0	0		0	0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi		Jenis dan Unit/Buah atau M2	0	0	0		0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	%	0	0	0	0	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	3200	Buah	0	0	0	0	3200	3200	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	2 dan 12	Rekening dan Bulan	0	0	0	0	2 dan 12	2 dan 12	100
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 dan 5 atau 3	Bulan dan Orang atau Unit	0	0	0	0	12 dan 5 atau 3	12 dan 5 atau 3	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		Bulan dan Orang atau Layanan	0	0	0	0		0	0
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor										0	0
	Penyediaan Makanan dan Minuman										0	0
	Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi										0	0
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100	%	0	0	0	0	100	100	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	Unit	0	0	0	0	1	1	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8	Unit	0	0	0	0	8	8	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional										0	0
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar yang disediakan		Unit	0	0	0	0		0	0
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan		Unit	0	0	0	0		0	0
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	105	Unit	0	0	0	0	105	105	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	35	Unit	0	0	0	0	35	35	100
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dikelola		Unit	0	0	0	0		0	0
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dikelola		Jenis atau Unit atau Buah	0	0	0	0		0	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2	Unit dan M2	0	0	0	0	2	2	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi		Jenis dan	0	0	0	0		0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Unit/Buah atau M2							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Jenis dan Unit/Buah atau M2	0	0	0	0		0	0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah luasan tanah yang dikelola	M2	0	0	0	0		0	0
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%	0	0	0	0		0	0
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dalam satu tahun	%	0	0	0	0		0	0
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan	0	0	0	0		0	0
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang dalam satu tahun	%	0	0	0	0		0	0
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kegiatan	0	0	0	0		0	0
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri dalam satu tahun	%	0	0	0	0		0	0
		Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan	0	0	0	0		0	0
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kegiatan	0	0	0	0		0	0
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri	Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri dalam satu tahun	%	0	0	0	0		0	0
		Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Unit	0	0	0	0		0	0
		Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kegiatan	0	0	0	0		0	0
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan	%	0	0	0	0		0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat dalam satu tahun								
		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kegiatan	0	0	0	0		0	0
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam satu tahun	%	0	0	0	0		0	0
		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya	Jumlah Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya	Kegiatan	0	0	0	0		0	0
		Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Kegiatan	0	0	0	0		0	0
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Kegiatan	0	0	0	0		0	0
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) dalam satu tahun	%	0	0	0	0		0	0
		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kegiatan	0	0	0	0		0	0
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	25	%	0	0	0	25	25	100
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun atau direvitalisasi	2	Unit	0	0	0	2	2	100
	Revitalisasi Pasar Tradisional	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan	2	Unit	0	0	0	2	2	100
	Sosialisasi Pembangunan Pasar Pananjung		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan yang dibuat	1	Dokumen	0	0	0	1	1	100
	Pendukung Revitalisasi Pasar									0	0
	Revitalisasi Pasar									0	0
	Penyusunan Amdal Pasar									0	0
	Penyusunan DED Pasar									0	0
	Penyusunan UKL UPL Pasar									0	0
	Penyusunan Andal Lalin									0	0
	Pembangunan Relokasi Sementara Pedagang Pasar									0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan Pembangunan Relokasi Sementara Pedagang Pasar									0	0
	Review DED Revitalisasi Pasar									0	0
	Pendukung Pembangunan Relokasi Sementara Pedagang Pasar									0	0
	Pengaspalan Pasar Parigi									0	0
	Revitalisasi Pasar (DAK)									0	0
	Pendukung Revitalisasi Pasar									0	0
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaan	3	Pasar	0	0	0	3	3	100
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	75	Orang	0	0	0	75	75	100
	Pembinaan Pedagang Pasar	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina dan dikendalikan	75	Orang	0	0	0	75	75	100
	Pendataan Pedagang Pasar	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang diberdayakan	75	Orang	0	0	0	75	75	100
	Pendataan Fasilitas Pasar									0	0
	Pendataan dan Monitoring Toko Swalayan									0	0
	Peningkatan Pemahaman Undang-undang Tentang Cukai Ilegal									0	0
										0	0
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	71,41	%	0	0	0	71,41	71,41	100
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terjamin ketersediannya	18	barang pokok dan penting	0	0	0	18	18	100
	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4	Kegiatan	0	0	0	4	4	100
		Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3	Kegiatan	0	0	0	3	3	100
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pelaksanaan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4	Kegiatan	0	0	0	4	4	100
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya	21	Barang Pokok	0	0	0	21	21	100
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha	Jumlah pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan	5	Kegiatan	0	0	0	5	5	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang								
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	5	Kegiatan	0	0	0	5	5	100
	Operasi Pasar Murah (OPM)	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	1	Kegiatan	0	0	0	1	1	100
	Subsidi Operasi Pasar Murah (OPM) (Banprov)									0	0
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk dan pestisida yang diterima oleh masyarakat	4	Jenis Pupuk	0	0	0	4	4	100
	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Perizinan yang diperiksa kelengkapan legalitasnya	5	Dokumen	0	0	0	5	5	100
	Pendataan dan Pemantauan Barang Bersubsidi (LPG, BBM dan Pupuk)	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	4	Jenis Pupuk	0	0	0	4	4	100
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	4	Jenis Pupuk	0	0	0	4	4	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor	10	%	0	0	0	10	10	100
		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang meningkat penjualannya	3	Produk	0	0	0	3	3	100
	Pelatihan Pengelolaan Komoditas Ekspor dan Produk Unggulan (DBH-CHT)	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina dan dikembangkan	3	Jenis Usaha	0	0	0	3	3	100
	Pembinaan/Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal (DBHCHT)									0	0
										0	0
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dagang nasional yang diselenggarakan dan diikuti	1	event	0	0	0	1	1	100
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dagang lokal yang diselenggarakan dan diikuti	1	event	0	0	0	1	1	100
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang difasilitasi misi dagang	3	Produk	0	0	0	3	3	100
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Ekspor yang ditingkatkan citranya	3	Produk	0	0	0	3	3	100
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	3	Pelaku Usaha	0	0	0	3	3	100
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang tertib ukur	51,28	%	0	0	0	51,28	51,28	100
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang, dan diawasi	2000	Unit	0	0	0	2000	2000	100
	Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	40	Kegiatan	0	0	0	40	40	100
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Metrologian									0	0
	Pendampingan Tera/Tera Ulang serta pengawasan BDKT									0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Kendaraan Kemetrologian (DAK)									0	0
	Pengadaan Kendaraan Pengawasan Kemetrologian									0	0
	Pengadaan Peralatan Kemetrologian (DAK)									0	0
	Pembangunan Gedung UPT Kemetrologian Daerah									0	0
	Pengadaan tanah untuk sarana UPT Kemetrologian Daerah									0	0
	Pengadaan Alat Ukur, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Banprov)									0	0
	Penyusunan DED sarana Gedung Kemetrologian Daerah									0	0
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	5 Kegiatan	0	0	0	0	5	5	100
		Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan penyidikan metrologi legal	3 Kegiatan	0	0	0	0	3	3	100
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	1 %	0	0	0	0	1	1	100
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya	2 Kegiatan	0	0	0	0	2	2	100
	Promosi Produk-produk Unggulan	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penggunaan produk lokal yang dilaksanakan	3 Kegiatan	0	0	0	0	3	3	100
	Sosialisasi Standar Mutu Produk (SNI)	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemasaran dan Promosi Penggunaan Produk Lokal	3 Kegiatan	0	0	0	0	3	3	100
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									0	0
										0	0
										0	0
										0	0
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pengunjung sistem dan jaringan informasi perdagangan	2000 Orang	0	0	0	0	2000	2000	100
										0	0
										0	0
	Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kakilima dan Asongan									0	0
	Penyusunan Raperda Retribusi Pedagang Kakilima									0	0
	Pemindahan PKL Pantai Barat dan Timur									0	0
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam		%	0	0	0		0	0
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlayani		%	0	0	0		0	0
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		0	0	0		0	0
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terlayani		%	0	0	0		0	0
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		0	0	0		0	0
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang patuh	48,61	%	0	0	0	48,61	48,61	100
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	35	Koperasi	0	0	0	35	35	100
	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	72	Koperasi Aktif	0	0	0	72	72	100
	Pembinaan dan Pengawasan									0	0
	Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan dan Pembinaan Koperasi									0	0
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa	72	Koperasi Aktif	0	0	0	72	72	100
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat dan cukup sehat	3,03	%	0	0	0	3,03	3,03	100
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang sehat dan cukup sehat	1	Koperasi	0	0	0	1	1	100
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	33	Koperasi	0	0	0	33	33	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan	1	Koperasi	0	0	0	1	1	100
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	7,78	%	0	0	0	7,78	7,78	100
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	25	Pengelola Koperasi	0	0	0	25	25	100
	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM pengelola koperasi yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan	30	Pengelola Koperasi	0	0	0	30	30	100
	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian									0	0
	Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Administrasi Keuangan KSP / USP Koperasi									0	0
	Peningkatan SDM pengelola koperasi dan anggotanya									0	0
	Pemberdayaan dan peningkatan peran Dekopinda Kabupaten Pangandaran									0	0
	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengelolaan Koperasi									0	0
	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan									0	0
	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (DAK)									0	0
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	23,61	%	0	0	0	23,61	23,61	100
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang meningkat volume usahanya	17	Koperasi	0	0	0	17	17	100
	Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen kelembagaan Koperasi Pondok Pesantren	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	72	Koperasi	0	0	0	72	72	100
	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi									0	0
	Penyelenggaraan pelatihan manajemen keuangan KSP/USP Koperasi									0	0
	Pembangunan Kantor Dekopinda Kabupaten Pangandaran (Banprov)									0	0
	Desa Koperasi (Banprov)									0	0
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	0,1	%	0	0	0	0,1	0,1	100
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan,	Jumlah wirausaha baru	1000	Wirausaha baru	0	0	0	1000	1000	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									
	Validasi dan Pemutakhiran Data UMKM	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang potensi dan pengembangannya	45000	Pelaku Usaha Mikro	0	0	0	45000	45000	100
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan									0	0
	Pendataan dan Penyusunan Profil UMKM									0	0
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan	120	Pelaku Usaha Mikro	0	0	0	120	120	100
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	120	Pelaku Usaha Mikro	0	0	0	120	120	100
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan kelembagaan potensi dan pengembangannya	30	Pelaku Usaha Mikro	0	0	0	30	30	100
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepingan dalam pemberdayaan usaha mikro	30	Pelaku Usaha Mikro	0	0	0	30	30	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	0,05	%	0	0	0	0,05	0,05	100
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang omsetnya meningkat	5	Pelaku	0	0	0	5	5	100
	Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30	Pelaku	0	0	0	30	30	100
	Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah									0	0
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan									0	0
	Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah									0	0
	Bintek Usaha Kecil Menengah									0	0
	Monitoring dan Evaluasi									0	0
	Pengembangan Usaha Kecil Menengah									0	0
	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah									0	0
	Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu									0	0
	Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi UMKM									0	0
	Sertifikasi SHAT									0	0
	Pelatihan Berbasis Kompetensi									0	0
	Fasilitas Pameran Tingkat Lokal (DBHCHT)									0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Permendagri 13)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi UMKM									0	0
	Kendaraan Promosi									0	0

Sumber: Hasil Analisis 2022

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Indikator kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran adalah Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, Persentase Koperasi Aktif, Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM, Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui system pengumpulan data kinerja dari tiap-tiap bidang di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran sedangkan dokumen-dokumen yang menjadi sumber data sebagai berikut:

a) Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian diperoleh dari hasil evaluasi LAKIP Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran tahun sebelumnya.

b) Persentase Koperasi Aktif

Sumber untuk data ini dapat dilihat pada <http://nik.depkop.go.id/> dengan syarat melakukan RAT. Dalam website resmi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini terlihat jumlah koperasi dan jumlah koperasi aktif.

c) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

Untuk mengetahui Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan dalam periode bulan Maret sampai dengan September 2018, dengan penambahan data usaha mikro yang diajukan selama tahun 2019 ke Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan.

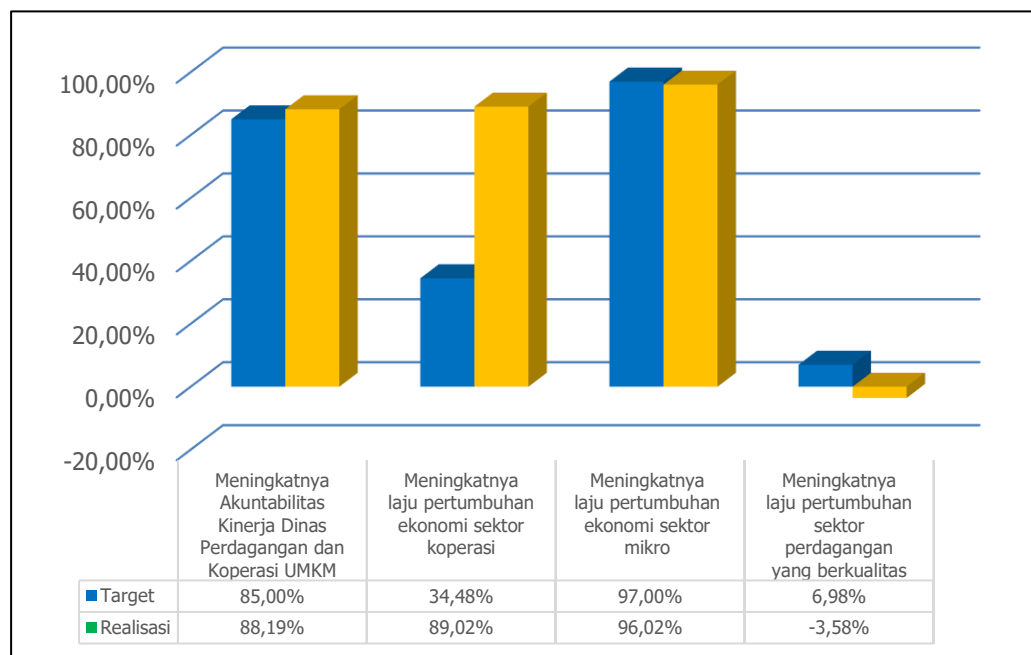
d) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB.

Data ini bias dilihat pada Kabupaten Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 2.2
Perbandingan Antara
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	85,00%	88,19%	103,75%
2.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	Persentase Koperasi Aktif	34,48%	89,02%	258,19%
3.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor mikro	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	97,00%	96,02%	98,99%
4.	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	6,98%	-3,58%	-51,29%

Sumber: LKjIP, Disdagkop 2022



Gambar 2.1
Perbandingan Antara
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Penjelasan

1) Nilai AKIP Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 1 RPJM Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi, maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian menetapkan tujuan sebagai berikut: Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam dalam sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dengan indicator sasaran Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2019 ditargetkan 85 dan realisasinya 88,19. Nilai 88,19 ini dicapai untuk penilaian LKjIP periode tahun 2019.

Dalam Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2019 memiliki nilai 88,19.

Berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Peringkat	Nilai	Predikat
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020, berperingkat A dengan predikat “memuaskan”

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kesatu

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	85,00%	88,19%	103,75%

Sumber: LKjIP, Disdagkop 2021

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran kesatu adalah sangat baik, dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar 103,75 % (sangat berhasil).

2) Persentase Koperasi Aktif

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 12 RPJM Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian menetapkan tujuan sebagai berikut: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi yang berkualitas yang dijabarkan dalam dalam sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dengan indicator sasaran Persentase Koperasi Aktif.

Persentase Koperasi Aktif dapat dihitung menggunakan formula:

$$\text{Persentase Koperasi Aktif} = \frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Seluruh Koperasi}} \times 100\%$$

Sebagaimana diketahui pada tahun 2020

Jumlah Koperasi = 82 Koperasi

Jumlah Koperasi Aktif = 73 koperasi

$$\text{Persentase Koperasi Aktif} = \frac{73}{82} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Koperasi Aktif} = 89.02\%$$

Persentase Koperasi Aktif adalah 89,02% dari 34,48% yang ditargetkan atau mencapai 258.19%.

Data Koperasi Aktif dapat dilihat di <http://nik.depkop.go.id/>

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kedua

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	Persentase Koperasi Aktif	34,48%	89,02%	258,19%

Sumber: LKjIP, Disdagkop 2021

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran kesatu adalah sangat baik, dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar 258,18 % (sangat berhasil).

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran di targetkan untuk mencetak Koperasi Sehat. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada Tahun 2020 hanya 1 (satu) Koperasi yang memperoleh predikat "Koperasi Sehat" yakni Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Megah yang beralamat di Jl. Padaherang No. 316/318 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang. Dari Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Unit Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Nomor 800/339/Disdagkop Tanggal 11 November 2020 bahwa berdasarkan penilaian terhadap 7 (tujuh) aspek mulai dari permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri Koperasi terhadap KPRI megah diperoleh skor 81,80 dengan predikat "sehat".

Tabel 2.6
Hasil Pengukuran Kesehatan Koperasi

NO	ASPEK PENILAIAN	RASIO / NILAI	SKOR	Jumlah	Kategori
A	PERMODALAN: 1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 2 Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko 3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri Terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	37,84% 369,46% 45,00%	3,00 6,00 3,00	12,00	SEHAT
B	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF: 1 Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap total/volume pinjaman diberikan 2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan 3 Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah 4 Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan	100,47% 1,00% 1143,65% 15,37%	10,00 4,00 5,00 5,00	24,00	SEHAT
C	MANAJEMEN: 1 Manajemen Umum 2 Manajemen Kelembagaan 3 Manajemen Permodalan 4 Manajemen Aktiva 5 Manajemen Likuiditas	2,50 1,50 3,00 1,80 3,00	2,50 1,50 3,00 1,80 3,00	11,80	SEHAT
D	EFISIENSI 1 Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto 2 Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor 3 Rasio Efisiensi Pelayanan	81,40% 76,98% 0,00%	4,00 2,00 2,00	8,00	SEHAT
E	LIKUIDITAS 1 Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar 2 Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima	0,77% 80,14%	2,50 5,00	7,50	DALAM PENGAWASAN
F	KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN 1 Rasio Rentabilitas Aset 2 Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 3 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan	5,54% 9,66% 122,85%	1,50 3,00 4,00	8,50	SEHAT
G	JATI DIRI KOPERASI 1 Rasio Partisipasi Bruto 2 Rasio Promosi Ekonomi Anggota	100,00% 17,31%	7,00 3,00	10,00	SEHAT
TOTAL SKOR PENILAIAN KESEHATAN		81,80			
KATEGORI PENILAIAN KESEHATAN		SEHAT			

3) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 12 RPJM Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian menetapkan tujuan sebagai berikut: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro yang berkualitas yang dijabarkan dalam dalam sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sector mikro dengan indicator sasaran Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM.

Untuk memperoleh Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM menggunakan formula

$$\text{Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM} = \frac{\text{Jumlah Usaha Mikro}}{\text{Seluruh UMKM}} \times 100\%$$

Dari hasil pendataan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran tahun 2018 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Usaha Mikro : 10.371 unit

Jumlah UMKM : 10.882 Unit

Pada tahun 2019 ada penambahan Usaha Mikro yang diperoleh dari Izin Usaha Mikro Kecil yaitu sebanyak 537 Usaha Mikro, sehingga pada tahun 2019 terdapat 10.908 unit Usaha Mikro. Sedangkan Usaha kecil menjadi 492 unit, sehingga jumlah UMKM menjadi 11.360 unit. Sehingga untuk tahun 2019

di peroleh data sebagai berikut:

Jumlah Usaha Mikro : 10.908 unit

Jumlah UMKM : 11.360 unit

$$\text{Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM} = \frac{10.908}{11.360} \times 100\%$$

$$\text{Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM} = 96,00\%$$

Untuk tahun 2021 tidak ada pendataan UMKM sehingga masih menggunakan data tahun 2019

Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM mencapai 96,00% dari yang ditargetkan 97,00% atau capaian 98,99%.

Berikut hasil pedataan jumlah Usaha Mikro dan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran tahun 2018.

		CIUGUR	PARIGI	PANGANDARAN	LANGKAPANCAR	KALUPUCANG	PADAHERANG	CIJULANG	MANGUNJAYA	SIDANULUH	CIMERAK	TOTAL	PERSENTASE
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	250	337	138 2	107 0	462	122 3	456	413	313	578	648 4	60%
	PEREMPUAN	134	484	124 5	402	243	509	357	381	116	527	439 8	40%
	TOTAL	384	821	262 7	147 2	705	173 2	813	794	429	110 5	108 82	100%
KLASIFIKASI UMKM	USAHA MIKRO	358	785	25 75	13 61	643	16 74	740	789	383	10 63	103 71	95%
	USAHA KECIL	26	36	52	111	62	58	73	5	46	42	511	5%
	USAHA MENENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL	384	821	262 7	147 2	705	173 2	813	794	429	110 5	108 82	100%
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA INDONESIA	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM	10	3	53	20	2	19	10	1	9	3	130	1%
	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
	INDUSTRI PENGOLAHAN	71	146	369	440	196	650	148	325	126	120	259 1	24%
	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0%
	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG, PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0%
	KONSTRUKSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR. BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	217	485	195 7	858	387	762	448	272	230	623	623 9	57%
	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0%
	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	82	180	215	140	115	273	192	186	52	339	177 4	16%
	KOMUNIKASI	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0%
	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	REAL ESTATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%
	JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PEJANJANG USAHA LAINNYA	1	2	4	3	4	12	5	1	4	3	39	0%
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	JASA PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0%
	KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0%
	KEGIATAN JASA LAINNYA	3	2	22	11	1	13	8	9	8	16	93	1%
	JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA; KEGIATAN YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN SENDIRI MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	KEGIATAN BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL	384	821	262 7	147 2	705	173 2	813	794	429	110 5	108 82	100%
PENDIDIKAN	SD	230	357	197 1	822	372	101 1	348	481	204	580	637 6	59%
	SMP	75	182	325	427	172	419	188	195	118	269	237 0	22%
	SMA	62	221	284	169	136	200	211	97	89	196	166 5	15%
	D3	1	5	9	7	5	5	14	8	1	8	63	1%
	D4	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	0%
	S1	7	18	23	26	10	21	29	6	5	29	174	2%
	S2	2	0	0	0	1	0	3	0	0	1	7	0%
	LAINNYA	5	38	15	21	9	76	16	7	12	22	221	2%
	TOTAL	384	821	262 7	147 2	705	173 2	813	794	429	110 5	108 82	100%
	TOTAL	384	821	262 7	147 2	705	173 2	813	794	429	110 5	108 82	100%
MARTIAL STATUS	BELUM KAWIN	4	5	16	14	10	17	9	4	37	18	134	1%
	KAWIN	350	742	253 4	139 6	666	161 7	749	743	376	100 7	101 80	94%
	CERAI HIDUP	10	21	29	36	8	27	14	11	7	30	193	2%
	CERAI MATI	20	53	48	26	21	71	41	36	9	45	370	3%
	TOTAL	384	821	262 7	147 2	705	173 2	813	794	429	110 5	108 82	100%

Sumber: LKJIP, Disdagkop 2021

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Ketiga

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor mikro	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	97,00%	96,02%	98,99%

Sumber: LKjIP, Disdagkop 2022

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor mikro, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran kesatu adalah sangat baik, dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar 98,99 % (sangat berhasil).

4) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 12 RPJM Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian menetapkan tujuan sebagai berikut: Terwujudnya Perdagangan Yang Berdaya Saing yang dijabarkan dalam dalam sasaran Meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas dengan indicator sasaran Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB.

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB dapat di hitung menggunakan formula:

$$\text{Prosentase pertumbuhan sektor perdagangan} = \frac{\text{Nilai PBRD sektor Perdagangan tahun } n - \text{Nilai PBRD sektor Perdagangan tahun } n - 1}{\text{Nilai PBRD sektor Perdagangan tahun } n - 1} \times 100\%$$

Untuk capaian Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB yang ditargetkan 6,78% dengan realisasi -3,58% atau capaian -50,29%.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Keempat

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	6,98%	-3,58%	-50,29%

Sumber: LKjIP, Disdagkop 2022

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran keempat adalah minus,

dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar -50,29 % (kurang baik).

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2019, diperoleh informasi bahwa capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2019 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa indikator kinerja capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran adalah:

1) Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan A dan realisasinya A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian adalah:

- a. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
- b. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.
- c. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

A. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

- a. Masih adanya indikator kinerja yang tidak mencapai target, namun masih dalam rentang "sangat berhasil", yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Bappeda

B. Upaya perbaikan

- a. Pengukuran kinerja menggunakan aplikasi
- b. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, dan semesteran)

2) Persentase Koperasi Aktif

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

- a. Adanya kegiatan pembinaan, pengawasan terhadap koperasi
- b. Meningkatnya kemampuan SDM Koperasi
- c. Sosialisasi pemahaman perkoperasian

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Ada dua cara untuk meningkatkan Persentase koperasi aktif yaitu dengan cara menambah koperasi yang aktif atau dengan cara membubarkan koperasi yang tidak aktif.

C. Upaya perbaikan

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kepada koperasi yang tidak aktif

3) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

- a. Adanya pendataan usaha mikro kecil dan menengah
- b. Peningkatan pemahaman untuk mengembangkan wirausaha baru

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Dengan adanya pencetakan wirausaha baru diharapkan pertumbuhan usaha mikro akan menjadi cepat.

C. Upaya perbaikan

Pembinaan UMKM dan mencetak wirausaha baru

4) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

- a. Mengadakan operasi pasar
- b. Pemantauan kegiatan perdagangan

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB dihitung oleh Badan Pusat Statistik

C. Upaya perbaikan

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran.

Indikator Kinerja Utama merupakan pedoman, untuk:

- 1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;



- 4) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Tabel 2.9 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase koperasi aktif		50%	32,69	33,65	34,48	36,95	33,96%	89,02%	90,00%	90,50%	
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil											
3	Ekspor Bersih Perdagangan**		700	100	125	130	135	4.574	4.750	5.000	5.250	

Sumber: Hasil Analisis, 2022

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana telah disampaikan dalam kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran di dalam menjalankan urusan pemerintahan telah mengacu pada aturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas selama ini secara umum Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memanfaatkan SDM, sarana dan prasarana yang ada, tetapi bukan berarti dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan suatu kendala atau hambatan, ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Permasalahan di Bidang Koperasi
 - Kesadaran anggota dalam berkoperasi masih perlu ditingkatkan
 - Sumber Daya Manusia pengelola koperasi masih perlu ditingkatkan
 - Jiwa Kewirausahaan para pengelola usaha kecil dan menengah relatif masih kurang
 - Kurangnya media pemasaran produk UMKM
2. Permasalahan di Bidang Perdagangan
 - Dampak Globalisasi membawa dampak dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan dan persaingan di sektor perdagangan dalam negeri
 - Pengawasan dan pemantauan yang lebih baik terhadap barang-barang yang beredar di pasaran masih perlu ditingkatkan agar masyarakat/konsumen mendapat perlindungan
3. Permasalahan di Bidang Pasar
 - Masih banyaknya pasar Desa yang belum di revitalisasi
 - Pengelolaan pendapatan dari retribusi kios belum optimal

Kendala seperti terungkap diatas diupayakan dengan mengoptimalkan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki agar tercapai

tujuan, sasaran dan Program yang telah disepakati bersama. Untuk lebih meningkatkan program-program pembangunan khususnya di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan perlu adanya peningkatan sarana, prasarana dan Sumber Daya manusia yang memadai sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian yang signifikan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022 seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2016 - 2021.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2022, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rancangan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun 2022 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 2.10 T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2023
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS HASIL KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM				79.372.994.200	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM				95.276.620.732
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				76.192.994.200	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				92.052.512.122
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	4.362.994.200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	4.312.304.142
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	109.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	53.899.600
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100%				2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100%	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%				3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop dagin	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	85.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskopdagin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskop dagin	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	5 Kegiatan dan 1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskopdagin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Diskop dagin	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	5 Kegiatan dan 1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Diskopdagin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Diskop dagin	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	5 Kegiatan dan 1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Diskopdagin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Diskop dagin	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	5 Kegiatan dan 1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Diskopdagin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop dagin	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	15 Kegiatan dan 3 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskopdagin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop dagin	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	3 Laporan	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskopdagin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	2.694.288.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100 %	2.726.255.839
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop dagin	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	19 Orang	2.603.088.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskopdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	2.688.598.439
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskop dagin	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskopdagin	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25.240.400
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Diskop dagin	Jumlah koordinasi SKPD yang dilaksanakan	12 Kegiatan dan 12 Laporan	5.000.000					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskop dagin	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	12 Kegiatan dan 1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskopdagin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.227.000
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Diskop dagin	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	2.000.000					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Diskop dagin	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	2 Laporan	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Diskopdagin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	2.190.000



RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS HASIL KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
							Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Diskop dagin	Jumlah laporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2 Dokumen	2.000.000					
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	38.100.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Presentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	30.618.400
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskop dagin	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	2 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskopdagin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.200.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Diskop dagin	Jumlah koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Diskopdagin	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.100.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop dagin	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	2 Kegiatan dan 2 Laporan	1.700.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskopdagin			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop dagin	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	12 Laporan	2.400.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskopdagin			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop dagin	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	7 Jenis dan 399 Unit/Buah	31.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskopdagin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	27.318.400
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	100%	238.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	100 %	138.504.800
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Diskop dagin	Jumlah Objek Retribusi Daerah yang didata	2,358 Objek	35.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Diskopdagin			30.000.000
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Diskop dagin	Jumlah wajib retribusi yang ditetapkan	2 Objek	175.000.000	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Diskopdagin	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	113.046.400
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Diskop dagin	Jumlah pengelolaan retribusi yang di laporkan	12 Laporan	28.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Diskopdagin	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	25.458.400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	59.210.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100 %	60.147.317
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskop dagin	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	44 Set	31.460.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskopdagin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	31.232.917
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Diskop dagin	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	12 Kegiatan dan 12 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Diskopdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	28.914.400
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Diskop dagin	Jumlah Pegawai yang Pensiun yang dipulangkan	2 Orang	2.750.000					
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	442.745.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	481.299.051
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Diskop dagin	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Jenis	1.422.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Diskopdagin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.561.967
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskop dagin	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	110 Jenis	65.962.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskopdagin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.557.821
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskop dagin	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Jenis	16.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskopdagin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.802.479
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskop dagin	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	47.875.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskopdagin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52.662.170
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskop dagin	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 Jenis	12.408.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskopdagin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120 Dokumen	13.464.000
Penyediaan Bahan/Material	Diskop dagin	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	20 Jenis	8.250.000	Penyediaan Bahan/Material	Diskopdagin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8.893.314
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskop dagin	Jumlah kunjungan tamu	1000 Orang	11.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskopdagin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.091.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop dagin	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	140 Kegiatan dan 140 Laporan	257.548.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskopdagin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	260.773.500
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop dagin	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	1Sistem	21.780.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskopdagin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	20.982.400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	447.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100 %	457.346.800
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskop dagin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	70.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskopdagin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	61.200.000



RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS HASIL KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskop dagin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	2 Unit	70.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskopdagin	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	66.998.000
Pengadaan Mebel	Diskop dagin	Jumlah mebel yang diadakan	3 Jenis dan 7 Unit/Buah	25.000.000	Pengadaan Mebel	Diskopdagin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	25.275.600
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskop dagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Jenis dan 15 Unit/Buah	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskopdagin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	163.873.200
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop dagin	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Unit dan ... M2	132.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskopdagin	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	140.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	176.244.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100 %	193.631.720
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskop dagin	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	3200 Buah	3.751.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskopdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.102.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskop dagin	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	2 Rekening dan 12 Bulan	60.720.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskopdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	66.587.520
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskop dagin	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan dan 5 Orang atau 3 Layanan	111.773.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskopdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	122.942.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	158.407.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100 %	170.600.615
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Diskop dagin	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	45.302.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskopdagin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	49.825.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskop dagin	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8 Unit	89.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskopdagin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	98.003.500
Pemeliharaan Mebel	Diskop dagin	Jumlah mebel yang dikelola	105 Unit	3.300.000	Pemeliharaan Mebel	Diskopdagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	16.500.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskop dagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	35 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskopdagin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.272.115
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskop dagin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2 Unit dan ... M2	5.705.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskopdagin	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100 %	170.600.615
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	25,00%	70.450.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	26,92 %	622.998.640
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	2 Unit	70.350.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun atau direvitalisasi	1 Unit	518.789.960
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pangandaran	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan	1 Unit	70.300.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	518.789.960
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan yang dibuat	3 Dokumen						
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pangandaran	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaan	3 Pasar	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pangandaran			
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	75 Orang	100.000.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	75 Orang	104.208.680
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pangandaran	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina dan dikendalikan	75 Orang	50.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	49.208.800
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pangandaran	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang diberdayakan	75 Orang	50.000.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	54.999.880
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	71,43%	540.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	66,67 %	160.799.852
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terjamin ketersediaannya	18 barang pokok dan penting	195.000.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terjamin ketersediaannya	18 barang pokok dan penting	195.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Kegiatan	65.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	56.880.752



RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS HASIL KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Kegiatan	65.000.000					
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaksanaan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Kegiatan	65.000.000					
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya	21 Barang Pokok	270.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya	21 Barang Pokok	400.000.000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	5 Kegiatan	75.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	74.988.600
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	5 Kegiatan	120.000.000					
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	1 Kegiatan	75.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	28.930.500
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pupuk dan pestisida yang diterima oleh masyarakat	4 Jenis Pupuk	75.000.000					
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perizinan yang diperiksa kelengkapan legalitasnya	5 Dokumen	25.000.000					
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Pangandaran	Jumlah pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	4 Jenis Pupuk	25.000.000					
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Pangandaran	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	4 Jenis Pupuk	25.000.000					
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase peningkatan nilai ekspor	10 %	319.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase peningkatan nilai ekspor	12 %	49.882.000
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang meningkat penjualannya	3 Produk	319.500.000	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang meningkat penjualannya	3 Produk	49.882.000
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina dan dikembangkan	3 Jenis Usaha	50.000.000					
Pameran Dagang Nasional	Kab. Pangandaran	Jumlah pameran dagang nasional yang diselenggarakan dan diikuti	1 event	200.000.000	Pameran Dagang Nasional	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	49.882.000
Pameran Dagang Lokal	Kab. Pangandaran	Jumlah pameran dagang lokal yang diselenggarakan dan diikuti	1 event	50.000.000					
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Pangandaran	Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang difasilitasi misi dagang	3 Produk	7.500.000					
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Pangandaran	Jumlah Produk Ekspor yang ditingkatkan citranya	3 Produk	7.000.000					
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	3 Pelaku Usaha	5.000.000					
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase UTP yang tertib ukur	51,28%	380.500.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase UTP yang tertib ukur	52,56 %	111.348.440
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah UTP yang ditera, tera ulang, dan diawasi	2000 Unit	380.500.000	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah UTP yang ditera, tera ulang, dan diawasi	2100 Unit	111.348.440
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	40 Kegiatan	280.500.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Pangandaran	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2100 Unit	111.348.440
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaksanaan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	5 Kegiatan	50.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Pangandaran	Persentase UTP yang tertib ukur	52,56 %	111.348.440
Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaksanaan penyidikan metrologi legal	3 Kegiatan	50.000.000					



RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS HASIL KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	1 %	140.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	1,5 %	93.589.500
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya	2 Kegiatan	140.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya	3 Buah	93.589.500
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah promosi penggunaan produk lokal yang dilaksanakan	3 Kegiatan	15.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5 UMKM	19.996.500
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Pemasaran dan Promosi Penggunaan Produk Lokal	3 Kegiatan	50.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	5 UMKM	49.933.000
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Pangandaran	Jumlah pengunjung sistem dan jaringan informasi perdagangan	1 Sistem	75.000.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	23.660.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.180.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.224.108.610
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang patuh	48,61%	250.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang patuh	50,68 %	199.939.440
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	35 Koperasi	250.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	37 Koperasi	199.939.440
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah koperasi yang diawasi	72 Koperasi Aktif	200.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	199.939.440
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah koperasi yang diperiksa	72 Koperasi Aktif	50.000.000					
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi yang meningkat status kesehatannya	3,03%	250.000.000					
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang meningkat status kesehatannya	1 Koperasi	250.000.000					
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	33 Koperasi	200.000.000					
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan	1 Koperasi	50.000.000					
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	7,78%	180.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	35 %	79.999.660
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	25 Pengelola Koperasi	180.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	25 Pengelola Koperasi	79.999.660
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Pangandaran	Jumlah SDM pengelola koperasi yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan	30 Pengelola Koperasi	180.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Pangandaran	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25 orang	79.999.660
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	23,61%	300.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	5 %	199.999.904
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang meningkat volume usahanya	17 Koperasi	300.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang meningkat volume usahanya	18 Koperasi	199.999.904
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten	Kab. Pangandaran	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	72 Koperasi	300.000.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten	Kab. Pangandaran	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	102 orang	199.999.904
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	1,10%	1.200.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA		Persentase pertumbuhan wirausaha baru	15 %	709.401.780



RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS HASIL KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya	120 UMKM	1.200.000.000	KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah wirausaha baru	1000 Wirausaha Baru	709.401.780
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pangandaran	Jumlah usaha mikro yang didata potensi dan pengembangannya	45000 Pelaku Usaha Mikro	350.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20000 Unit Usaha	252.603.200
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Pangandaran	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan	120 Pelaku Usaha Mikro	600.000.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	10000 Unit Usaha	288.337.180
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Pangandaran	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	120 Pelaku Usaha Mikro	100.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Pangandaran	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	4000 Unit Usaha	59.915.000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pangandaran	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan kelembagaan potensi dan pengembangannya	30 Pelaku Usaha Mikro	100.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	108.546.400
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Pangandaran	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	30 Pelaku Usaha Mikro	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Pangandaran	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	15 %	709.401.780
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	0,05%	1.000.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	0,1 %	0,1 %
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah usaha mikro yang naik kelas	5 Pelaku	1.000.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah usaha mikro yang omsetnya meningkat	100 Pelaku Usaha Mikro	100 Pelaku Usaha Mikro
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Pangandaran	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30 Pelaku	1.000.000.000	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha
					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	60 %	595.580.970
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	60 %	595.580.970
					Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	150.000.000
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	16 Dokumen	74.950.250
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	21 Dokumen	130.630.720
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20 Dokumen	240.000.000
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	100 %	70.000.000
					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IUI Kecil dan Menengah yang difasilitasi perizinannya	25 Dokumen	70.000.000
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	25 Dokumen	35.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU,	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam	25 Dokumen	35.000.000



RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS HASIL KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sib Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
					IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diinformasikan	20 %	143.978.000
					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	20 Data	143.978.000
					Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6 Dokumen	124.000.000

Sumber: Hasil Analisis, 2022

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, disamping berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat.

Berbagai usulan dari masyarakat yang muncul di Musrenbang Desa kemudian dibawa dalam Musrenbang Kecamatan, lalu diteruskan ke Perangkat Daerah sesuai tupoksi.

Dari situ kemudian akan ditelaah untuk dibahas di dalam lingkup Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti dalam draft Renja PD pada tahun yang akan datang. Berbagai pertimbangan akan diambil untuk meneruskan atau menunda program atau kegiatan usulan dari masyarakat, mulai dari ketersediaan anggaran, sampai pada bahan pendukung berupa proposal baik untuk pelatihan dan bantuan peralatan, bukan kewenangan/ tidak diakomodir/ penyesuaian indikator dan target/ penyesuaian pendanaan. Untuk lebih jelasnya ada di tabel 2.11

Tabel 2.11 T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pangandaran

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak	Jumlah Kios	40 Unit	Dikaji ulang
		Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak	Jumlah Pasar	1 Unit	Dikaji ulang
		Desa Suka Maju Kecamatan Mangunjaya	Jumlah Kios	5 Unit	Dikaji ulang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Desa Pangandaran	Jumlah Pasar Ikan	1 Unit	Dikaji ulang
		Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar	Jumlah Pasar	1 Unit	Dikaji ulang
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				
	Sarana Pemasaran UMKM	Desa Babakan Kecamatan Pangandaran	Jumlah Sarana Pemasaran	1 Unit	Dikaji ulang

Sumber: Hasil Analisis, 2022

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



3.1 Telaah terhadap Kebijakan

3.1.1 Kebijakan Nasional

3.1.1.1 Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global. Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

- 1) Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
- 2) Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UMKM. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

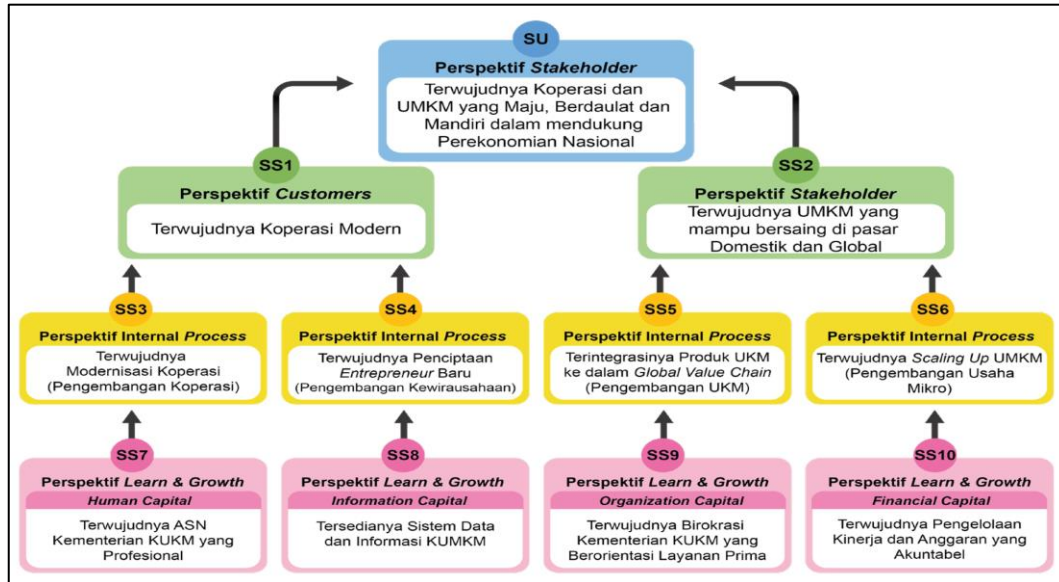
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern		1. Modernisasi Koperasi 2. Melahirkan Wirausaha Baru (<i>New Enterpreuner</i>)
		Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	1. Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi 2. Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
			3. Pertumbuhan <i>Start-up</i> berbasis Koperasi
2.	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global,		1. Integrasi UMKM dalam <i>Global Value Chains (GVC)</i> 2. UMKM Naik Kelas (<i>Scalling Up</i>)
		Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	1. Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM 2. Persentase Total Nilai Ekspor UMKM 3. Persentase Total Investasi UMKM 4. Persentase UKM Naik Kelas 5. Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM 6. Rasio Kewirausahaan
3.	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi		1. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.
		Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Indeks Kualitas Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM
		Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi	Kualitas Integrasi Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
		Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sumber: Renstra Kememterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2020-2024, 2021

Berkaitan hal tersebut diatas, untuk operasionalisasi pencapaian sasaran strategis diperlukan penajaman secara perspektif, melalui penentuan Sasaran Utama dan Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

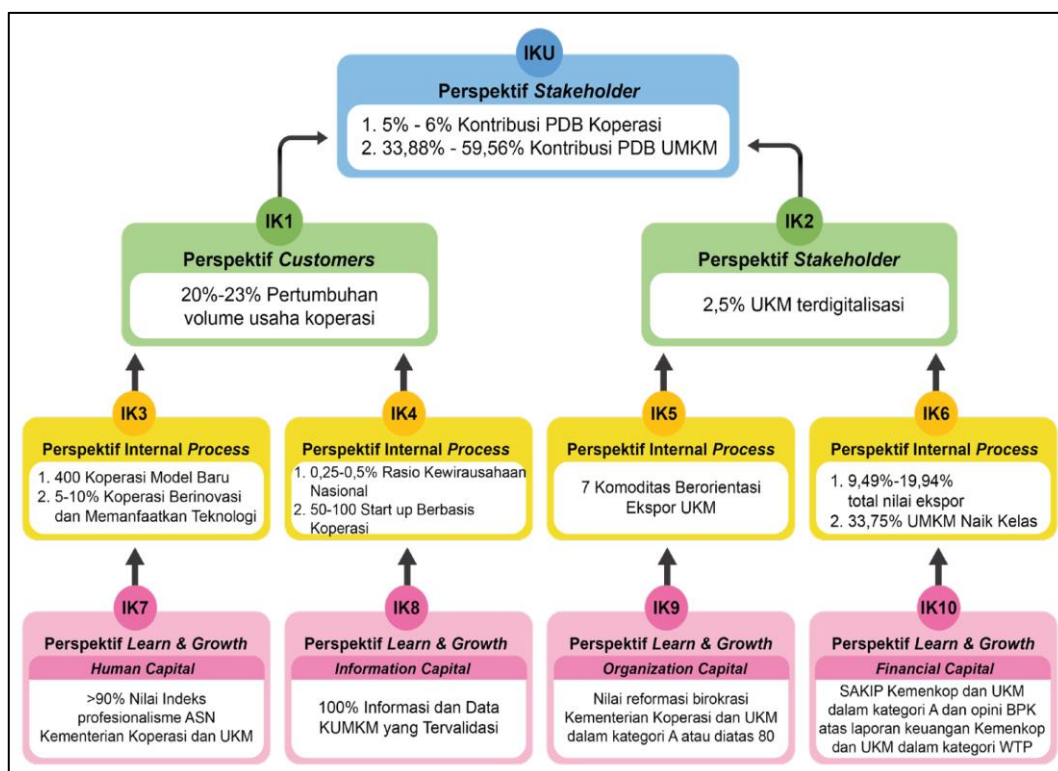


Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2021

Gambar 3.1

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024

Selanjutnya, untuk Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2021

Gambar 3.2

Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 serta sasaran prioritas Program Kerja Presiden Tahun 2020-2024, maka Arah Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang akan dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 terbagi ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas (Scalling Up)
2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
3. Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang).

Ketiga arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut akan dilaksanakan secara terarah dengan fokus Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 yaitu:

- 1) Prioritas pengembangan Koperasi dan UMKM pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor;
- 2) Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra produksi;
- 3) Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemi-

traan;

- 4) Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM;
- 5) Modernisasi dan inovasi teknologi;

Berdasarkan lima (5) strategi pengembangan Koperasi dan UMKM tersebut, akan diimplementasikan melalui empat (4) agenda perubahan, yaitu:

1. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains (GVC)*;
2. Mendorong UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*);
3. Melahirkan Wirausaha Baru (*New Entrepreneur*);
4. Modernisasi Koperasi.

3.1.1.2 Kementerian Perdagangan

Visi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yaitu "*Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.*" Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. Visi ini akan didukung dengan misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan yaitu:

- 1) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
- 2) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Kementerian Perdagangan. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran
Kementerian Perdagangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;		Neraca Perdagangan
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	1. Neraca perdagangan 2. Pertumbuhan ekspor rill barang dan jasa 3. Pertumbuhan ekspor



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
			barang non migas 4. Rasio ekspor jasa terhadap PDB 5. PTA/FTA/CEPA yang disepakati
2.	Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;		Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor
		Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	Inflasi pangan bergejolak
		Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)
		Meningkatnya pasar produk dalam negeri	1. Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor 2. Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional
		Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	1. Pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 2. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan 3. Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK).
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas;		Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan professional	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)" 3. Nilai Hasil Evaluasi AKIP 4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 5. Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdagangan	Indeks Profesionalisme SDM Perdagangan

Sumber: Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024, 2021

Dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, RPJMN 2020-2024 sebagai landasan utama pembangunan Indonesia selama lima tahun kedepan telah menuangkan 5 (lima) Arah Presiden yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
- 2) Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
- 3) Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
- 4) Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
- 5) Peningkatan pemberdayaan konsumen
- 6) Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
- 7) Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri
- 8) Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
- 9) Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- 10) Penguatan Pelayanan Publik Prima
- 11) Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
- 12) Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

3.1.1.3 Kementerian Perindustrian

Rencana strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035, dan Kebijakan Industri Nasional 2020-2024. Renstra Kementerian Perindustrian merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun industri yaitu Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam beberapa perspektif yaitu:

1. *Stakeholders Perspective;*
2. *Customer Perspective;*

3. *Internal Process Perspective; dan*

4. *Learn & Growth Perspective.*

Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut Kementerian Perindustrian melaksanakan 9 (sembilan) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan nasional.

Arah rencana pembangunan industri nasional dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 juga diarahkan kepada pengembangan 10 industri prioritas, khususnya pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih difokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:

1. Industri makanan dan minuman;
2. Industri tekstil dan busana;
3. Industri otomotif;
4. Industri kimia; dan
5. Industri elektronika.

Disamping itu, arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dilaksanakan melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Kebijakan Pemberdayaan Industri;
4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan
6. Kebijakan RB.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak hanya bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian saja, akan tetapi juga keberhasilan Kementerian/Lembaga maupun instansi lain yang mendukung dan menjadi aspek penting lainnya, karena sektor industri pengolahan nonmigas bukan sektor yang dapat berdiri sendiri melainkan sangat berhubungan erat dengan sektor lain. Kesuksesan pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas.

3.1.2 Provinsi Jawa Barat

3.1.2.1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023, yaitu

“Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”,

dalam mewujudkan visi tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat menyokong misi Gubernur pada poin 4 yakni Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Ummat yang Sejahtera dan Adil.

Dalam upaya pencapaian visi misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Tujuan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Mewujudkan Koperasi dan Usaha Kecil yang berdaya saing dan berkontribusi pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat		Persentase Pertumbuhan Kredit
		Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil	Persentase Koperasi yang mengakses kredit
			Persentase UMKM yang naik Kelas

Sumber: Perubahan Renstra 2018-2023 Diskus Jawa Barat, 2021

Strategi dan arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dengan arah kebijakan Peningkatan Pemahaman Anggota Melalui Diklat Perkoperasian dan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dalam memanfaatkan ICT dan Jaringan Pemasaran;
2. Peningkatan kapasitas Kelembagaan dengan arah kebijakan Peningkatan Koperasi Aktif, Peningkatan kepatuhan Koperasi untuk Menerapkan Nilai dan Prinsip Koperasi, Peningkatan Kemandirian Koperasi;
3. Peningkatan Kualitas Usaha dengan arah kebijakan Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Koperasi untuk Menjangkau Pasar Terutama dalam Promosi Produk, Akses Informasi Pasar dan Saluran Pemasaran, Pengembangan Kapasitas Koperasi untuk Berinovasi dalam Pengembangan dan Layanan bagi Anggota;
4. Peningkatan Akses Pemasaran UMKM dengan arah kebijakan Peningkatan Akses Pemasaran Berbasis ICT, Peningkatan Kualitas Produk UMKM, Peningkatan Jejaring Usaha UMKM dan Peningkatan Iklim Usaha di Pesantren.

3.1.2.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jawa Barat, sebagai provinsi terbesar penduduknya serta perkembangan infrastruktur yang pesat, memiliki potensi yang besar untuk mengukuhkan keunggulan industri dan perdagangannya, menjadi juara dan memberikan dampak pada visi Gubernur Jawa Barat yaitu:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menyokong misi gubernur pada poin 4 yaitu "Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan". Pada misi tersebut terdapat poin penting yang menjadi tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu meningkatkan produktivitas industri, baik Industri Kecil Menengah (IKM) maupun Industri Besar dengan memfasilitasi pelaku industri di Jawa Barat untuk kemajuannya. Selain itu, peran di yang ada di Jawa Barat sehingga kapasitas produk yang dihasilkan semakin meningkat yang harus diiringi dengan perdagangan serta Reposisi Kedudukan Dinas Visi Jabar Juara serta dalam Era Industri baru. Upaya mewujudkan visi dan Misi ke-4 Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan oleh Gubernur, diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) sebagai arahan saat pelaksanaannya. Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, yakni adanya pandemi COVID 19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Di tinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemic Covid 19 ditandai dengan perlambatan konsumsi ekonomi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sector terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi dan misinya.

Tabel 3.4

**Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Tujuan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Jawa Barat		Kontribusi Industri Jawa Barat terhadap Nasional
		Meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur Jawa Barat	PDRB industri non migas
2	Meningkatnya peran perdagangan dalam		Laju Pertumbuhan Perdagangan Jawa Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
	stabilitas perekonomian Jawa Barat		
		Meningkatnya ekspor non migas Jawa Barat	Laju pertumbuhan ekspor non migas
		Meningkatnya perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Sumber: Perubahan Renstra 2018-2023 Disindag Jawa Barat, 2021

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diatas maka Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menetapkan strategi dan arah kebijakannya. Adapun strategi dalam pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing industri dengan arah kebijakan Mengembangkan industri unggulan Jawa Barat, perwilayahan industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan meningkatkan pemberdayaan industry;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri dengan arah kebijakan Meningkatkan system dan jaringan distribusi barang; menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok; meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan; revitalisasi/membangun pasar rakyat; dan perlindungan konsumen; Memperluas infrastruktur dan teknologi bagi peningkatan daya saing usaha ekonomi kreatif;

Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ditentukan dari prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat. Isu prioritas yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi yang diarahkan untuk mendukung penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di sektor industri dan perdagangan.

3.1.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pemahaman atas arah pembangunan Kabupaten Pangandaran yang akan dilaksanakan dalam sisa waktu perencanaan. Penelaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong bagi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dalam memberikan pelayanan mengenai urusan Perdagangan dan Koperasi UMKM di Kabupaten Pangandaran yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pangandaran dalam sisa waktu perencanaan yang ada.

Visi mencerminkan arah pembangunan atau keadaan masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke mendatang. Pada penjabaran visi harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dapat diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan pertimbangan kondisi daerah Kabupaten Pangandaran, permasalahan-permasalahan pembangunan, tantangan-tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan terkait visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 adalah:

"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"

Agar rumusan visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
<i>"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"</i>	Pangandaran Juara	Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain.
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.
	Berdasarkan nilai-nilai	Nilai (<i>value</i>) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
	karakter bangsa	pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

(Sumber: Ranwal RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026, 2021)

Ketiga pokok-pokok visi di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Penjabaran misi pembangunan akan memperjelas serta mempertegas arah pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

Misi merupakan penjabaran dari visi yang kemudian disusun dalam rangka implementasi terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi daerah. Visi yang telah dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi, selanjutnya disajikan dalam bagian keterkaitannya antara visi dan misi pembangunan Kabupaten Pangandaran pada kurun waktu lima tahun ke depan. Keterkaitan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6

**Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026**

Visi	Pokok - Pokok Visi	Misi
<i>"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"</i>	Pangandaran Juara	Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
		Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga

Visi	Pokok - Pokok Visi	Misi
		kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
		Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Misi 5: mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
		Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Sumber: Ranwal RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pangandaran, 2021)

Pada hasil pemetaan Misi sesuai dengan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan enam Misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran selama tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama

Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan di suatu daerah. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khusus atau khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ramah, mawas diri, dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan. Bertumpu pada nilai-nilai tersebut, dapat diyakini akan memunculkan tatanan masyarakat yang tenteram, tertib, toleransi dan saling menghargai terhadap kesetaraan gender.

2. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan

Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada peluang perluasan lapangan kerja. Pembangunan berbasis pengembangan wisata memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan berbasis wisata merupakan sebuah kerangka yang dapat digunakan pemerintah untuk menggali serta mengembangkan industri pariwisata secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini

akan fokus pada upaya pengembangan dan penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran.

3. Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan

Sebagai bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia atau human resource akan berkontribusi besar memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam misi kedua ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada pengembangan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.

4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal

Stabilitas dan ketahanan ekonomi dapat ditentukan dari kondisi makro ekonomi yang meliputi kebijakan jangka menengah ke panjang, kinerja pemerintah dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan ekonomi daerah dilihat melalui indikator laju inflasi, PDRB, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan proses serta hasil akhir (*output*) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.

6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan

Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Pada hal ini Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur sebagai pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlu adanya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Kesimpulannya adalah Visi Kepala Daerah akan terwujud melalui misi dan perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah khususnya dengan memperkuat Program Unggulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Mengingat pentingnya tujuan dan sasaran pada Renstra, maka perlu adanya sinkronisasi antara tujuan dan sasaran dengan janji politik kepala daerah terpilih. Sehingga, tujuan dan sasaran dengan janji politik bupati akan terkolaborasikan dan saling mendukung guna mencapai pembangunan daerah yang diinginkan. Selain itu, urgensi sinkronisasi janji politik dengan tujuan dan sasaran Renstra yakni adanya sinkronisasi antara kepala daerah dengan perangkat daerah yang akan menjalankan roda pemerintahan. Berikut ini disajikan tabel sinkronisasi antara janji politik bupati dengan tujuan dan sasaran Renstra.

Tabel 3.7

Korelasi Sasaran Renstra dengan Janji Politik Bupati Terpilih

No	Sasaran	Janji Politik Bupati
1	Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah	- Revitalisasi pasar rakyat - Membuat toko Pangandaran Juara
2	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	- Peningkatan kemandirian pengusaha mikro dan kecil - Peningkatan dukungan dan fasilitasi bagi wirausaha baru - Mencetak lima ribu wirausaha muda dan pengembangan pelaku industri kreatif

Sumber: Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pangandaran, 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran memiliki tanggungjawab untuk mensukseskan program unggulan Kepala Daerah terpilih yaitu Revitalisasi pasar rakyat, Membuat toko Pangandaran Juara, Peningkatan kemandirian pengusaha mikro dan kecil, Peningkatan dukungan dan fasilitasi bagi wirausaha baru yang fokus untuk mendukung ketercapaian dari misi 4 (empat) RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

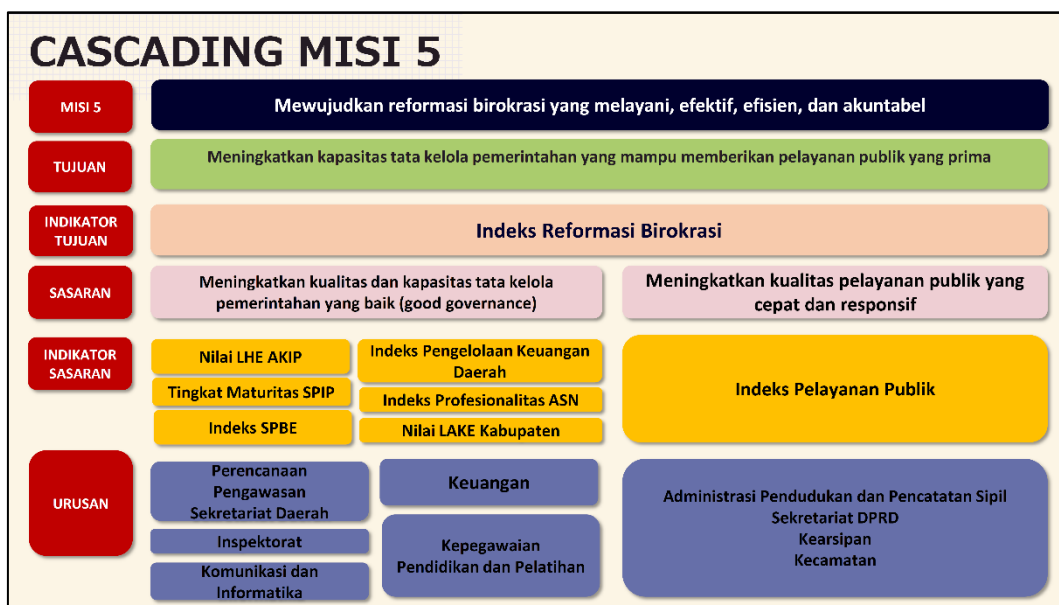
3.2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Visi-Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran mendukung untuk visi pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026 yaitu **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa”**. Hal tersebut diwujudkan melalui misi 4 (empat) **“Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal”** dan misi 5 (lima) **“Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel”**. Berikut ini adalah cascading Daerah yang menunjukkan posisi dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dalam mendukung dan mewujudkan Pembangunan Daerah kedepan.



Sumber: Raperda RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, 2021

Gambar 3.3
Cascading Misi 4 RPJMD
Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026



Gambar 3.4
Cascading Misi 5 RPJMD
Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026

Berpijak pada keterkaitan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rp	2.243,97	2.440,99	2.243.97	2.454.37	2.585,97	2.717,57	2.849,16	
		Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	5	5,5	6	7	8	9	10	
	Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		Rasio Kewirausahaan	%	2,54	3,50	3,75	3,95	4,15	4,3	4,5	
		Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	15	15	15	15	15	15	15	
		Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	%	42.68	43,90	45.12	46.34	47.56	48.78	49,25	
2	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		Nilai LHE AKIP	Nilai	66,73	66,90-67,15	67,25-69,00	69,25-72,00	72,25-76,00	76,25-81,00	81,00-85,50	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai	90,05	67,00	69,00	71,00	75,00	77,00	82,00	

Sumber: Renstra Diskopdagin 2021-2026, 2022

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

3.2.2 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Adapun tujuan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 yaitu:

- 1) Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
- 2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Untuk menilai pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

- 1) PDRB Sektor Perdagangan
- 2) Rasio Kewirausahaan
- 3) Nilai LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

3.2.3 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu oleh instansi pemerintah untuk merumuskan yang lebih spesifik, terukur.

Adapun sasaran langsung yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah
- 2) Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM
- 3) Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan
- 2) Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
- 3) Persentase Koperasi Yang Meningkat Kualitasnya
- 4) Nilai LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

3.2.4 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan penunjang Perdagangan dan Koperasi UMKM melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bab III Renstra ini. Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu sisa perencanaan mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3. Pengembangan Ekspor
4. Meningkatkan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
6. Penciptaan Entepreneur Baru
7. Meningkatkan Kualitas Koperasi Sektor Riil
8. Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

3.2.5 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat
3. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

4. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
5. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
6. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
7. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
8. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
9. Pemberdayaan Kewirausahaan
10. Mengembangkan SDM dan kualitas produk Usaha Mikro
11. Mengembangkan kelembagaan Koperasi
12. Mengembangkan SDM Koperasi
13. Mengembangkan potensi usaha Koperasi
14. Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur Dinas Perdagangan dan Kopearsi UMKM Kabupaten Pangandaran

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ dan Kebijakan			
VISI Daerah		: Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa	
MISI IV		: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatan Kinerja Perdagangan Daerah	Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat
		Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
		Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor

VISI Daerah	:	Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa	
MISI IV	:	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Unggulan
		Meningkatkan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Penciptaan Entrepreneur Baru	Pemberdayaan Kewirausahaan Mengembangkan SDM dan kualitas produk Usaha Mikro
	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Meningkatkan Kualitas Koperasi Sektor Riil	Mengembangkan kelembagaan Koperasi Mengembangkan SDM Koperasi Mengembangkan potensi usaha Koperasi
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>goodgovernance</i>)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

Sumber: Renstra Diskopdagin 2021-2016, 2022

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk

mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

Rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel T-C.33, sebagaimana terlihat berikut.



Tabel 3.10 T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								6.687.304.306			8.764.658.113			
2	17	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.312.304.142			5.023.658.113			
2	17	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								53.899.600			59.290.000			
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	32.999.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	36.300.000
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.199.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.420.000
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.199.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.420.000
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.199.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.420.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.199.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.420.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	5.499.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	6.050.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	6.599.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	7.260.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.726.255.839	2.646.828.642					
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Orang/Bula n	100 %	2.688.598.439	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.583.996.642
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	25.240.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	37.510.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10.227.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	12.100.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	2.190.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.420.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							30.618.400				49.401.000		
2	17	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.420.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	1.210.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %				Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %			
2	17	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	27.318.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	37.510.000	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							138.504.800				262.680.000		
2	17	1	2.04	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	113.046.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	192.500.000	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	25.458.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	33.880.000	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							60.147.317				567.003.900		
2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	31.232.917	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	32.336.600	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	28.914.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	43.318.000	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							481.299.051				538.343.919		
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	1.561.967	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	1.720.620	



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	72.557.821	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	79.814.020	
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100 %
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100 %
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100 %
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	17.802.479	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	19.965.000	
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100 %
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100 %
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100 %
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	52.662.170	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	57.928.750	
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100 %
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100 %
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100 %
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	120 Dokumen	100 %	13.464.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	15.013.680	
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100 %
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100 %
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100 %
2	17	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	8.893.314	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	9.982.500	
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100 %
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100 %
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100 %
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	12.091.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	13.310.000	



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %			
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %			
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %			
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	120 Laporan	100 %	260.773.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	282.655.549	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur						100 %							Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100 %
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas						100 %							Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100 %
				Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi						100 %							Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100 %
2	17	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	20.982.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	25.000.000	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur						100 %							Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100 %
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas						100 %							Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100 %
				Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi						100 %							Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100 %
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20.510.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	26.353.800	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur						100 %							Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100 %
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas						100 %							Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100 %
				Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi						100 %							Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100 %
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							457.346.800				495.182.700			
2	17	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terrealisasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	61.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	70.282.700	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur						100 %							Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100 %
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas						100 %							Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100 %
				Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi						100 %							Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100 %
2	17	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terrealisasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	66.998.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	84.700.000	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur						100 %							Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100 %
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas						100 %							Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100 %



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	25.275.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	30.000.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %			Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %			Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %		
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	163.873.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	165.000.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %			Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %			Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %		
2	17	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	140.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	145.200.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %			Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %			Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %		
2	17	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								193.631.720			213.255.482			
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	4.102.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	4.538.710
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 %	66.587.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	73.471.200
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	122.942.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	135.245.572



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Pagu Indikatif (Rp.)
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						170.600.615				191.672.470			
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediaka	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	49.825.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	54.815.420
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediaka	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	98.003.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	107.811.000
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediaka	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	16.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	18.150.000
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediaka	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	6.272.115	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	6.903.050
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							199.939.440			255.000.000			
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							199.939.440			255.000.000			



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang patuh	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,68 %	40 Unit Usaha	37 Koperasi	199.939.440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koperasi yang patuh	50,68 %	200.000.000	
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								79.999.660				80.000.000	
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								79.999.660				80.000.000	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	25 orang	25 Pengelola Koperasi	79.999.660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	35 %	80.000.000	
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								199.999.904				200.000.000	
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								199.999.904				200.000.000	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Jumlah koperasi yang meningkat volume usahanya (Koperasi)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	102 orang	18 Koperasi	199.999.904	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	5 %	200.000.000	
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								709.401.780				795.000.000	
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								709.401.780				795.000.000	
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah wirausaha baru	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	20000 Unit Usaha	1000 Wirausaha Baru	252.603.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	15 %	260.000.000	
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah wirausaha baru	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	10000 Unit Usaha	1000 Wirausaha Baru	288.337.180	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	15 %	310.000.000	
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah wirausaha baru	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	4000 Unit Usaha	1000 Wirausaha Baru	59.915.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	15 %	60.000.000	
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah wirausaha baru	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	100 Unit Usaha	1000 Wirausaha Baru	108.546.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	15 %	110.000.000	
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								1.185.659.380				2.200.000.000	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								1.185.659.380				2.200.000.000	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Jumlah Unit Usaha yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang omsetnya meningkat	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,1 %	100 Unit Usaha	100 Pelaku Usaha Mikro	1.185.659.380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	0,1 %	2.200.000.000	



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										1.038.618.432		2.238.700.000	
3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										622.998.640		930.000.000	
3	30	3	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										518.789.960		830.000.000	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,92 %	1 unit	1 Unit	518.789.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	26,92 %	770.000.000
3	30	3	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya										104.208.680		100.000.000	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya (Orang)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,92 %	1 Dokumen	75 Orang	49.208.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	26,92 %	50.000.000
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya (Orang)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,92 %	1 Dokumen	75 Orang	54.999.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	26,92 %	50.000.000
3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING										160.799.852		645.000.000	
3	30	4	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										56.880.752		195.000.000	
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terjamin ketersediannya (barang pokok dan penting)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,67 %	4 Laporan	18 Barang	56.880.752	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	66,67 %	65.000.000
3	30	4	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										103.919.100		400.000.000	
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya (Barang Pokok)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,67 %	4 Laporan	21 Barang	74.988.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	66,67 %	75.000.000
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya (Barang Pokok)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,67 %	4 Laporan	21 Barang	28.930.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	66,67 %	75.000.000
3	30	5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR										49.882.000		169.500.000	
3	30	5	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										49.882.000		169.500.000	
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Persentase peningkatan nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang meningkat penjualannya (Produk)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	2 Pelaku Usaha	3 Produk	49.882.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan nilai ekspor	12 %	50.000.000
3	30	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										111.348.440		315.000.000	
3	30	6	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan										111.348.440		315.000.000	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase UTPP yang tertib ukur	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah UTPP yang ditera, tera ulang, dan diawasi (Unit)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,56 %	2100 Unit	2100 Unit	111.348.440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase UTPP yang tertib ukur	52,56 %	210.000.000



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								93.589.500			155.000.000		
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								93.589.500			155.000.000		
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya (Buah)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,5 %	5 UMKM	3 Buah	19.996.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	1,5 %	20.000.000
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya (Buah)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,5 %	5 UMKM	3 Buah	49.933.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	1,5 %	55.000.000
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya (Buah)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,5 %	1 Dokumen	3 Buah	23.660.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	1,5 %	80.000.000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								809.558.970			1.017.212.073		
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								595.580.970			697.500.000		
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								595.580.970			697.500.000		
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	1 Dokumen	60 %	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	60 %	22.000.000
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	16 Dokumen	60 %	74.950.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	60 %	150.000.000
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	21 Dokumen	60 %	130.630.720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	60 %	85.000.000
														Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	20 Dokumen	60 %	240.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	60 %	300.000.000
														DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								70.000.000			90.000.000		
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								70.000.000			90.000.000		
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha	Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Dokumen	25 Dokumen	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	100 %	40.000.000



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS												
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Dokumen	25 Dokumen	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	100 %	50.000.000	
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							143.978.000			229.712.073			
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							143.978.000			229.712.073			
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diinformasikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya fasilitasi IKM dalam memperoleh perizinan (IUI)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	6 Dokumen	20 Data	124.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diinformasikan	20 %	139.000.000	
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diinformasikan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Tersedianya fasilitasi IKM dalam memperoleh perizinan (IUI)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	3 Dokumen	20 Data	19.978.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diinformasikan	20 %	30.212.073	
TOTAL													8.535.481.708				12.020.570.186	

Sumber: Hasil Analisis, 2022

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

- 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
- 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**
- 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 32.999.920
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen
 - 2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 2.199.960
 - Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
 - 2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 2.199.960
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
 - 2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 2.199.960
 - Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
 - 2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 2.199.960
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
 - 2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 5.499.960
 - Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 3 Dokumen

2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 7.726.000

Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3 Laporan

2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.635.279.439

Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
ASN 19 Orang

2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Masukan : Jumlah Dana 25.106.000

Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen

2.17.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Masukan : Jumlah Dana -

Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD 12 Dokumen

2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Masukan : Jumlah Dana 10.227.000

Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan

2.17.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan
dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen

2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD

Masukan : Jumlah Dana 2.190.000

Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2 Laporan

2.17.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran 1 Dokumen

2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

2.17.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Masukan : Jumlah Dana 2.200.000

Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD 1 Dokumen

2.17.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Masukan : Jumlah Dana 1.100.000

Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
SKPD 1 Laporan

2.17.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1
Laporan

2.17.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan

2.17.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Masukan : Jumlah Dana 27.184.000

Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD 12 Laporan

2.17.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

2.17.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Daerah 3 Dokumen

2.17.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi

Masukan : Jumlah Dana 112.240.000

Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 1

Dokumen

2.17.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Masukan : Jumlah Dana 25.324.000

Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12

Dokumen

2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2.17.01.2.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Masukan : Jumlah Dana 31.232.917

Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket

2.17.01.2.04.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Masukan : Jumlah Dana 28.780.000

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen

2.17.01.2.04.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Pegawai yang Pensiun yang dipulangkan 0 Orang

2.17.01.2.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200 Orang

2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Masukan : Jumlah Dana 1.561.967

Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket

2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan : Jumlah Dana 72.557.821

Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket

2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Masukan : Jumlah Dana 17.802.479

Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket

2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Masukan : Jumlah Dana 52.662.370

Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket

2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Masukan : Jumlah Dana 13.464.000

Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 120 Dokumen

2.17.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Masukan : Jumlah Dana 8.893.314

Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket

2.17.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Masukan : Jumlah Dana 12.095.500

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 12 Laporan

2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Masukan : Jumlah Dana 260.795.000

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan

2.17.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Masukan : Jumlah Dana 20.848.000

Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen

2.17.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Masukan : Jumlah Dana 20.376.000

Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen

2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**2.17.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Masukan : Jumlah Dana 61.200.000

Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit

2.17.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Masukan : Jumlah Dana 66.198.000

Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit

2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

Masukan : Jumlah Dana 25.275.600

Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit

2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Masukan : Jumlah Dana 166.326.300

Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit

2.17.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

Masukan : Jumlah Dana 120.000.000

Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit

2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Masukan : Jumlah Dana 4.102.000

Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan

2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Masukan : Jumlah Dana 66.587.520

Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan

2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Masukan : Jumlah Dana 122.699.000

Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan

2.17.01.2.09 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Masukan : Jumlah Dana 49.825.000

Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit

2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Masukan : Jumlah Dana 98.074.500

Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit

2.17.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit

2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Masukan : Jumlah Dana 16.500.000

Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit

2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Masukan : Jumlah Dana 5.640.850

Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit 1 Unit

2.17.03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Masukan : Jumlah Dana 199.999.840

Keluaran : Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Unit Usaha

2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja 40 Unit Usaha

2.17.04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI



2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 40 Unit Usaha

2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan 1 Unit Usaha

2.17.05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Masukan : Jumlah Dana 79.999.820

Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 25 Orang

2.17.06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Masukan : Jumlah Dana 199.999.904

Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 102 Orang

2.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Masukan : Jumlah Dana 252.913.200

Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000 Unit Usaha

2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

Masukan : Jumlah Dana 288.337.300

Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 10.000 Unit Usaha

2.17.07.2.01.03 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Masukan : Jumlah Dana 59.950.000

Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 4.000 Unit Usaha

2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Masukan : Jumlah Dana 108.556.400

Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 100 Unit Usaha

2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 30 Orang

2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Masukan : Jumlah Dana 2.143.766.820

Keluaran : Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam

Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 100 Unit Usaha

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Masukan : Jumlah Dana 519.999.960

Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Masukan : Jumlah Dana 48.940.000

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3 Unit

3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Masukan : Jumlah Dana 54.999.880

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen

3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Masukan : Jumlah Dana 54.999.880

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen

3.30.04. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

- Masukan : Jumlah Dana 56.137.752
- Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 Laporan
- 3.30.04.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- Masukan : Jumlah Dana 0
- Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 laporan
- 3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- Masukan : Jumlah Dana 0
- Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 Laporan
- 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**
- 3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- Masukan : Jumlah Dana 76.118.500
- Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan
- 3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Masukan : Jumlah Dana 0
- Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 4 Laporan

3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Masukan : Jumlah Dana 26.000.500

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan

3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 1 Dokumen

3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 2 Laporan

3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 2 Laporan

3.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina 4 Pelaku usaha

3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 2 Pelaku Usaha

3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 2 Pelaku Usaha

3.30.05.2.01.04 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 0 Pelaku Usaha

3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 2 Produk

3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina 2 Pelaku Usaha

3.30.06. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan****3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang**

Masukan : Jumlah Dana 101.516.340

Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 2.100 Unit

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 100 orang

3.30.06.2.01.03 Penyidikan Metrologi Legal

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal 5 Unit

3.30.07. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 5 uMKM

3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Masukan : Jumlah Dana 0

Keluaran : Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi 5 UMKM

3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Masukan : Jumlah Dana 23.660.000

Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 1 Dokumen

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

3.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Masukan : Jumlah Dana 152.320.450

Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen

3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Masukan : Jumlah Dana 50.036.700

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 21 Dokumen

3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Masukan : Jumlah Dana 75.101.574

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 16 Dokumen

3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Masukan : Jumlah Dana 525.084.460

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 21 Dokumen

3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Masukan : Jumlah Dana 243.239.700

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 20 Dokumen

3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Masukan : Jumlah Dana 52.215.150

Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen

3.31.03. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Masukan : Jumlah Dana 35.208.537

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS 25 Dokumen

3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

Masukan : Jumlah Dana 36.500.200

Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Dokumen

3.31.04. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Masukan : Jumlah Dana 126.237.114

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 6 Dokumen

3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

Masukan : Jumlah Dana 19.986.600

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 3 Dokumen

3.31.04.2.01.02 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Masukan : Jumlah Dana 48.388.921

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen

PENUTUP



Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2022, akan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahun yang bersangkutan, disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2016-2021 serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 dan telah disesuaikan dengan pemetaan Permendagri Nomer 90 tahun 2019. Bahwa untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Strategik Tahun 2016 – 2021 maka ditetapkan Program dan Kegiatan tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
2. Bahwa Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang rencana dilaksanakan pada tahun 2023 dititikberatkan pada peningkatan efektifitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pada bidang Perdagangan dan Koperasi UMKM terutama untuk pemulihan ekonomi.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 yang disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dalam visi dan misi Perangkat Daerah.



Parigi, 27 Juli 2022

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. TEDI GARNIDA, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680728 199303 1 008



Lampiran 1

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								6.687.304.306			8.764.658.113			
2	17	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.312.304.142			5.023.658.113			
2	17	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								53.899.600			59.290.000			
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	32.999.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	36.300.000
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur			100 %			Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas			100 %			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi			100 %			Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %		
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.199.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.420.000
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur			100 %			Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas			100 %			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi			100 %			Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %		
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.199.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.420.000
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur			100 %			Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas			100 %			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %		



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.199.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.420.000	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.199.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.420.000	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	5.499.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	6.050.000	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	6.599.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	7.260.000	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.726.255.839					2.646.828.642			
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Orang/Bulan	100 %	2.688.598.439	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.583.996.642	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %			
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %				Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %			
2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	25.240.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	37.510.000	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10.227.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	12.100.000	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	2.190.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.420.000	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						30.618.400				49.401.000			
2	17	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.420.000	
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
						Persentase sarana prasarana kantor yang teroenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang teroenuhi	100 %		



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	1.210.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %			Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %			Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %		
2	17	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	27.318.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	37.510.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %			Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %			Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %		
2	17	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							138.504.800				262.680.000		
2	17	1	2.04	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	113.046.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	192.500.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %			Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %			Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %		
2	17	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	25.458.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	33.880.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %			Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %			Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %		
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							60.147.317				567.003.900		
2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	31.232.917	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	32.336.600
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %			Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %			Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %		
2	17	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	28.914.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	43.318.000



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %							Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %							Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %							Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						481.299.051				538.343.919			
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	1.561.967	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	1.720.620
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	72.557.821	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	79.814.020
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	17.802.479	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	19.965.000
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	52.662.170	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	57.928.750
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	120 Dokumen	100 %	13.464.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	15.013.680
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %			
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %			
2	17	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	8.893.314	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	9.982.500	
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	12.091.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	13.310.000	
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	120 Laporan	100 %	260.773.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	282.655.549	
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	20.982.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	25.000.000	
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20.510.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	26.353.800	
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					457.346.800			495.182.700					
2	17	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	61.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	70.282.700
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	66.998.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	84.700.000
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	25.275.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	30.000.000
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	163.873.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	165.000.000
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	140.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	145.200.000
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %	
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	
2	17	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					193.631.720			213.255.482					
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	4.102.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	4.538.710



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %			
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %			
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %			
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediaka	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 %	66.587.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	73.471.200	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
				Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediaka	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	122.942.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	135.245.572	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
				Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							170.600.615				191.672.470		
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediaka	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	49.825.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	54.815.420	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
				Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %		
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediaka	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	98.003.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	107.811.000	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur					100 %						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100 %		
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100 %						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %		
				Persentase sarana prasarana kantor vano terenuhi					100 %						Persentase sarana prasarana kantor yang terenuhi	100 %		



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediaka	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	16.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	18.150.000
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %			Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %			Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %		
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediaka	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	6.272.115	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	6.903.050
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %			Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %		
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %		
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %			Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi				100 %		
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							199.939.440			255.000.000			
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							199.939.440			255.000.000			
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang patuh	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,68 %	40 Unit Usaha	37 Koperasi	199.939.440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Koperasi yang patuh	50,68 %	200.000.000
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							79.999.660			80.000.000			
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							79.999.660			80.000.000			
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	25 orang	25 Pengelola Koperasi	79.999.660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	35 %	80.000.000
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							199.999.904			200.000.000			
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							199.999.904			200.000.000			
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Jumlah koperasi yang meningkat volume usahanya (Koperasi)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	102 orang	18 Koperasi	199.999.904	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	5 %	200.000.000
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							709.401.780			795.000.000			
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							709.401.780			795.000.000			
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah wirausaha baru	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	20000 Unit Usaha	1000 Wirausah a Baru	252.603.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pertumbuhan wirausaha baru	15 %	260.000.000



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah wirausaha baru	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	10000 Unit Usaha	1000 Wirausah a Baru	288.337.180	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pertumbuhan wirausaha baru	15 %	310.000.000
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah wirausaha baru	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	4000 Unit Usaha	1000 Wirausah a Baru	59.915.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pertumbuhan wirausaha baru	15 %	60.000.000
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah wirausaha baru	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	100 Unit Usaha	1000 Wirausah a Baru	108.546.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pertumbuhan wirausaha baru	15 %	110.000.000
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								1.185.659.380					2.200.000.000
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								1.185.659.380					2.200.000.000
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang omsetnya meningkat	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,1 %	100 Unit Usaha	100 Pelaku Usaha Mikro	1.185.659.380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	0,1 %	2.200.000.000
														Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								1.038.618.432					2.238.700.000
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								622.998.640					930.000.000
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								518.789.960					830.000.000
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,92 %	1 unit	1 Unit	518.789.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	26,92 %	770.000.000
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								104.208.680					100.000.000
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya (Orang)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,92 %	1 Dokumen	75 Orang	49.208.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	26,92 %	50.000.000
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya (Orang)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,92 %	1 Dokumen	75 Orang	54.999.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	26,92 %	50.000.000
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								160.799.852					645.000.000
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								56.880.752					195.000.000



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terjamin ketersediannya (barang pokok dan penting)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,67 %	4 Laporan	18 Barang	56.880.752	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	66,67 %	65.000.000
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								103.919.100				400.000.000	
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya (Barang Pokok)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,67 %	4 Laporan	21 Barang	74.988.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	66,67 %	75.000.000
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya (Barang Pokok)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,67 %	4 Laporan	21 Barang	28.930.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	66,67 %	75.000.000
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								49.882.000				169.500.000	
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								49.882.000				169.500.000	
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Persentase peningkatan nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang meningkat penjualannya (Produk)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	2 Pelaku Usaha	3 Produk	49.882.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan nilai ekspor	12 %	50.000.000
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								111.348.440				315.000.000	
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								111.348.440				315.000.000	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase UTTP yang tertib ukur	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang, dan diawasi (Unit)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,56 %	2100 Unit	2100 Unit	111.348.440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase UTTP yang tertib ukur	52,56 %	210.000.000
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								93.589.500				155.000.000	
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								93.589.500				155.000.000	
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya (Buah)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,5 %	5 UMKM	3 Buah	19.996.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	1,5 %	20.000.000
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya (Buah)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,5 %	5 UMKM	3 Buah	49.933.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	1,5 %	55.000.000
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya (Buah)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,5 %	1 Dokumen	3 Buah	23.660.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	1,5 %	80.000.000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								809.558.970				1.017.212.073	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								595.580.970				697.500.000	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								595.580.970				697.500.000	



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	1 Dokumen	60 %	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	60 %	22.000.000
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	16 Dokumen	60 %	74.950.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	60 %	150.000.000
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	21 Dokumen	60 %	130.630.720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	60 %	85.000.000
												Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi						
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	20 Dokumen	60 %	240.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	60 %	300.000.000
												DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)						
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								70.000.000				90.000.000	
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								70.000.000				90.000.000	
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Dokumen	25 Dokumen	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	100 %	40.000.000
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Dokumen	25 Dokumen	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	100 %	50.000.000
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								143.978.000				229.712.073	



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							143.978.000				229.712.073		
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diinformasikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya fasilitasi IKM dalam memperoleh perizinan (IUI)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	6 Dokumen	20 Data	124.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diinformasikan	20 %	139.000.000
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diinformasikan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Tersedianya fasilitasi IKM dalam memperoleh perizinan (IUI)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	3 Dokumen	20 Data	19.978.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diinformasikan	20 %	30.212.073
TOTAL												8.535.481.708					12.020.570.186	